



DLH Yogya Bantah Armadanya Buang Sampah di Saptosari

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya angkat suara terkait kasus pembuangan sampah ilegal di Padukuhan Dondong, Saptosari, Gunungkidul. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya menegaskan bahwa kendaraan yang digunakan untuk memboyong sampah itu bukan milik instansinya.

"Itu bukan ranah kami, karena kendaraan tidak ada identitas dari DLH

Kota Yogya," tandas Kabid Pengelolaan Persampahan DLH Kota Yogya, Ahmad Haryoko, Jumat (22/11).

Diberitakan sebelumnya, sebanyak lima truk dam diamankan polisi setelah kedapatan membawa sampah yang diduga berasal dari Kota Yogya, untuk dibuang secara ilegal di Padukuhan Dondong, Saptosari, Gunung-

● ke halaman 7

DLH Yogya Bantah

● Sambungan Hal 1

kidul, Rabu (20/11). DLH Gunungkidul bahkan menyebut sampah-sampah itu diangkut dari Depo Mandala Krida, Kota Yogya.

Ahmad menyampaikan, armada sampah tersebut sama sekali tidak mengantongi izin untuk menggulirkan aktivitas pembuangan dari Pemkot Yogya. Oleh sebab itu, pihaknya pun tidak bisa memastikan, apakah benar pembuangan liar itu dilakukan armada dari Kota Yogya dan sampahnya berasal dari depo-depo yang dikelolanya.

"Saya kurang tahu ya, tentang Saptosari, karena kalau ada dari pihak non pemerintah, tidak ada izin atau permohonan," ungkapnya.

Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup mendesak Pemkot Yogyakarta untuk merampungkan problem tumpukan sampah di depo, hingga akhir tahun ini. Eksekutif pun harus memutar otak, lantaran sejauh ini kondisi beberapa depo di Kota Pelajar masih penuh dengan gunung limbah. Salah satunya di Depo Kotabaru yang berlokasi di sebelah utara

Gedung RRI Yogyakarta.

Kondisi depo tersebut, jadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir, karena sampah mulai meluber sampai badan jalan. Ahmad menegaskan siap menindaklanjuti arahan dari kementerian itu.

"Sebagaimana disampaikan kementerian, kami diberi waktu (menyelesaikan tumpukan sampah di depo) paling tidak sampai akhir tahun," tandasnya.

Menurutnya, unit-unit pengolahan sampah yang sudah direalisasikan Pemkot Yogya, bakal dioptimalkan kapasitas pengelolaannya. Sehingga, secara bertahap tumpukan sampah di depo bisa diangkut dan diboyong menuju deretan TPS, yang berlokasi di Nitikan, Karangmiri, hingga Kranon.

"Ya sudah nanti kita optimalkan unit pengolahan sampah itu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada sekarang. Kita berusaha untuk itu, sesuai dengan target yang dibebankan kementerian. Apapun yang kita miliki akan dioptimalkan," cetusnya.

Anggaran terbatas

Ia juga menyebut bahwa alokasi anggaran untuk upaya pengelolaan sampah

di Kota Yogyakarta cenderung masih sangat terbatas. Ahmad menuturkan, pada 2024 instansinya mendapat kucuran sekitar Rp96 miliar. Jumlah tersebut masih terbagi untuk gaji karyawan dan kebutuhan lainnya, sehingga tidak seluruhnya diarahkan ke persampahan.

"Untuk pengelolaan persampahan, hampir 40 persen, untuk pengangkutan, penyapuan, pengolahan, termasuk edukasi ke masyarakat juga," katanya.

Meski demikian, Haryoko tidak menampik, alokasi anggaran itu belum mencukupi untuk mewujudkan pengolahan sampah yang lebih modern. Sebab, dibutuhkan belanja modal dalam jumlah besar, misalnya untuk pembelian mesin atau peralatan guna menunjang pengolahan limbah.

"Kalau mau sampai tuntas, karena pasti ada pengolahan-pengolahan sampah dengan teknologi modern, ke depan pasti lebih banyak lagi. Ke depan ketersediaan anggaran lebih banyak operasional. Apa yang sudah terbangun di 2024 ini nanti dioptimalkan operasionalnya di 2025," cetusnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005